

RENCANA PROGRAM SEMESTER

MATA PELAJARAN	:	SEJARAH INDONESIA	KODE GURU: A15
NAMA GURU	:	ANA WAHYUNING S, S.Pd	
KELAS	:	XII/ TKJ & RPL	
STANDART KOMPETENSI LULUSAN	:	3. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, serta dampak fenomena dan kejadian. 4. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, serta dampak fenomena dan kejadian.	
KOMPETENSI INTI	:	3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.	

NO.	KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK	ALOKASI WAKTU	JML JAM / MINGGU	JML MINGGU	JULI 2016					AGUS 2016					SEP 2016					OKT 2016					NOV2016					DES 2016						
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	3.1	Mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan.	Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan Integrasi Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Integrasi Bangsa dan Negara RI.	10 JP	2	5																															
	3.2	Mengevaluasi peran tokoh Nasional dan Daerah yang Berjuang Mempertahankan Keutuhan Negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 – 1965					a	Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965)																													
	4.1	Merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta dan G 30 S/PKI) dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.					b	Dari Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran																													
	4.2	Menulis sejarah tentang tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948- 1965.																																			
	3.3	Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.					Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin	10 JP	2	5																											
3.4	Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.	a	Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal																																		
4.3	bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.	b	Mencari Sistem Ekonomi Nasional																																		
4.4	Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.	c	Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin																																		
4.4	Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.	d	Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin																																		
3	3.5	Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.	Kehidupan Bangsa Indonesia di Masa Orde Baru dan Reformasi	14 JP	2	7																															
	3.6	Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi.					a	Masa Transisi 1966-1967																													
	3.7	Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia.					b	Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi																													
	4.5	Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.					c	Integrasi Timor-Timur																													
	4.6	Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.					d	Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru																													
	4.6	Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.					e	Masa Akhir Orde Baru																													
	4.7	Menulis sejarah tentang peran pelajar, mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia.					f	Perkembangan Politik dan Ekonomi																													
TOTAL			28JP	2	17																																

**JUMLAH PERTEMUAN DALAM 1 SEMESTER : 17 KALI TATAP MUKA
SELAMA PRAKERIN 2 BULAN AKAN DIBERIKAN MODUL SELAMA DUA KALI SEHINGGA KERJAKAN UJI
KOMPETENSI DAN TUGAS PROYEK PADA MODUL SEBAGAI PENGGANTI MATERI DAN TUGAS.**

KD 3.1 + 4.1

KD 3.2 + 4.2

KD 3.3 + 4.3

KD 3.4 + 4.4

KD 3.5 + 4.5

KD 3.6 + 4.6

Ada 6 pasang KD = 6 kali Ulangan KD

Nilai Pengetahuan → UKD total (memiliki bobot 2), UTS (bobot 1), UAS (bobot 1)

Nilai Keterampilan → Proses (bobot 1), Proyek (bobot 2), (produk bobot 1)

Kilas Sejarah:

Sejak dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 negara Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer Barat. Pada masa ini disebut masa Demokrasi Liberal. Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan UUDS tahun 1950. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politika pada masa demokrasi liberal telah mendorong lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai.

Demokrasi liberal berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataannya, rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 50 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK EKONOMI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

A. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni UUDS 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai dengan diterapkan di Indonesia. Dalam demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem kabinet parlementer, artinya pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggungjawab pada parlemen atau DPR. Sering bergantinya kabinet memicu timbulnya ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Partai politik mementingkan kepentingan golongan masing-masing sehingga kabinet jatuh bangun
2. Partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat pemilih,
3. Partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya, sebab masa kerja kabinet pendek.

Sistem kabinet parlementer memungkinkan adanya persaingan antarpolitical politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI dan Masyumi) silih berganti memimpin kabinet.

Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, diantaranya yaitu:

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1950)

Kabinet Natsir merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI, tokoh pendukung kabinet ini adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat, Ir. Djuanda, dan Prof Soemitro Joyohadikusumo. Program kerja kabinet Natsir meliputi:

- A. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
- B. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman.
- C. Konsolidasi dan menyempurnakan organisasi susunan pemerintahan.
- D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
- E. Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat.

Program-program tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kabinet ini bubar sebelum masa kerjanya habis. Adapun sebab jatuhnya Kabinet Natsir ini adalah sebagai berikut.

- A. Perundingan pengembalian Irian Barat dari Belanda ke Indonesia mengalami jalan buntu.
- B. Adanya mosi tidak percaya dari PNI berkaitan dengan pencabutan PP No.39 1950 tentang DPRD dan DPRS yang dianggap menguntungkan Masyumi.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Kabinet kedua yang memegang tampuk pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah kabinet Sukiman, yang merupakan kabinet koalisi terbentuk 27 April 1951. Partai-partai yang berkoalisi adalah kedua partai terbesar waktu itu, yaitu Masyumi dan PNI. Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi terpilih menjadi perdana menteri, sedangkan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Kabinet ini terkenal dengan sebutan Kabinet Sukiman-Suwiryo.

Program kabinet Sukiman adalah sebagai berikut:

- A. Menjamin keamanan dan ketentraman
- B. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
- C. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
- D. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif.
- E. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Pada tanggal 3 April 1952 kabinet Sukiman jatuh. Penyebab jatuhnya kabinet ini karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negerinya yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro Amerika Serikat. Pada saat itu Kabinet Sukiman telah menandatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi dan persenjataan dari Amerika Serikat yang dikenal dengan Mutual Security Act (MSA) pada tahun 1951. Persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga yang berhasil dibentuk pada tanggal 30 Maret 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Wilopo dari PNI terpilih sebagai perdana menteri. Program kerja Kabinet Wilopo sebagai berikut:

- A. Persiapan pemilu
- B. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan
- C. Keamanan dalam negeri
- D. Perjuangan pembebasan Irian Barat
- E. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
- F. Melengkapi UUD perburuan

Akan tetapi sebelum menjalankan semua programnya pada tanggal 3 Juni 1953 Kabinet Wilopo jatuh. Adapun sebab jatuhnya diantaranya sebagai berikut:

- A. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh AD yang dipimpin Nasution agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru.
- B. Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa (Sumatera Utara) Peristiwa ini berhubungan dengan masalah yang menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat. Rasa tidak puas itu menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dengan petani yang diusir dari tempat

tinggalnya berupa bekas perkebunan pada zaman Belanda. Dalam bentrokan ini beberapa petani tewas sehingga bermunculan kecaman keras dari pers dan parlemen.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Setelah mengalami krisis kabinet hampir dua bulan, maka terbentuklah Kabinet Ali Sastroamijoyo dengan program sebagai berikut.
 - A. Program dalam negeri mencakup keamanan, pemilu, dan kemakmuran.
 - B. Program luar negeri meliputi pelaksanaan luar negeri bebas aktif.
 - C. Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia.Kabinet Ali wongsonegoro menghadapi gangguan keamanan dalam negeri, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihindangi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil ikut terangkat namanya. Namun, Kabinet Ali akhirnya jatuh pada 12 Agustus 1955 dalam usia dua tahun (usia terpanjang). Kabinet Ali Wongsonegoro terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden pada tanggal 24 Juli 1955 karena adanya perselisihan pendapat antara TNI AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan kepala Staf TNI AD tanggal 27 Juni 1955.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
Program Kabinet Burhanuddin Harahap sebagai berikut:
 - A. Melaksanakan pemilihan umum.
 - B. Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia.
 - C. Melaksanakan kerja sama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif.Prestasi yang menonjol dari kabinet ini meliputi berikut:
 - A. Berhasil melaksanakan pemilu 1955.
 - B. Berhasil menyelesaikan peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kasad baru, yakni Kol. A. H. NasutionSetelah pemilu tidak mendapat dukungan lagi, maka tanggal 3 Maret 1956 Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)
Pada tanggal 20 Maret 1956 terbentuk kabinet keenam yang dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo II. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama hasil pemilihan umum dan merupakan kabinet koalisi tiga partai besar tautu PNI, Masyumi, dan NU.
Program kerja kabinet Ali Sastroamijoyo II meliputi:
 - A. Pembatalan hasil KMB
 - B. Menyelesaikan masalah Irian Barat
 - C. Pemilihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun.
 - D. Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan KAA di Bandung 1955.Kabinet Ali II hanya berumur satu tahun. Hal ini disebabkan munculnya gerakan separatisme di daerah-daerah dan ditariknya kembali menteri-menteri dari Masyumi yang melemahkan kabinet Ali. Akhirnya tanggal 14 Maret 1957, Ali menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno dan digantikannya oleh kabinet Juanda.
7. Kabinet Juanda (9 April 1957-5 Juli 1959)
Kabinet Ali II digantikan oleh Kabinet Juanda dengan 3 Orang wakilnya yaitu Mr. Hardi, Idham, Chalid, Dr. Leimena. Tugas kabinet ini adalah menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Program kabinet Juanda dikenal dengan nama Panca Karya.
Program kabinet Juanda adalah sebagai berikut:
 - A. Membentuk Dewan Nasional
 - B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia
 - C. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
 - D. Perjuangan pengembalian Irian Barat
 - E. Mempergiat atau mempercepat proses pembangunan.

Pada masa kabinet ini terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang disebut sebagai peristiwa Cikini. Peristiwa Cikini ini terjadi di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957. Kabinet berakhir dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

B. Pemilu 1955

Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali I dengan membentuk panitia pemilu pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang berdirinya partai-partai di Indonesia maka muncul partai-partai yang berpaham Islam, nasionalis, komunis dan partai-partai yang pertama di Indonesia. Pemilu tersebut diadakan dalam dua periode:

1. Periode I pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR
2. Periode II pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Pelaksanaan Pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan ikut dalam pemilihan umum.

Hasil pemilu untuk anggota DPR diumumkan 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), Nahdatul Ulama (45 kursi), dan PKI (39 kursi). Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri kabinet Burhanuddin Harahap.

Hasil pemilu untuk anggota Dewan Konstituante diumumkan pada 16 Juli 1956 perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya adalah PNI (119 kursi), Masyumi (112 kursi), NU (91 kursi), dan PKI (80 kursi).

Keanggotaan Dewan Konstituante terdiri atas anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah mengangkat anggota Konstituante jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUDS 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi. Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik yang seperti diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Hal itu menyebabkan pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, dekrit ini dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

UJI HISTORIA

Pada tahun 1955 bangsa Indonesia telah mengadakan pemilu yang pertama kalinya. Pemilu tersebut dikatakan paling demokratis dibandingkan dengan pemilu pada masa sesudahnya. Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan pemilu tahun 2014 jika dibandingkan dengan pemilu 1955? Buatlah perbandingannya secara sederhana lalu kemukakan pendapat Anda!

C. Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tersendat adalah sebagai berikut.

1. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
2. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.
3. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah.
4. Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
6. Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, serta belum memiliki tenaga ahli dan dana yang memadai.
7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan karena banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah.
8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sedangkan program baru mulai dirancang.
10. Angka pertumbuhannya dan jumlah penduduk yang besar.

Dari masalah itulah yang harus dihadapi oleh pemerintah antara lain mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Adapun masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang terendah.

D. Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Ekonomi

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadap cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Gunting Syafruddin

Kebijakan Gunting Syafruddin berupa pemotongan nilai uang (sanering) dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri NO 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 miliar. Dampaknya yaitu rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki Rp. 2,50 ke atas hanya orang kelas menengah dan atas. Kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi ini merupakan usaha pemerintah RI untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah pada masa kabinet Natsir yang direncanakan oleh Menteri Perdagangan Soemitro Joyohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).

Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan masyarakat Indonesia dengan cara berikut.

- a. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- c. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang maju.

Gagasan Soemitro ini dituangkan dalam program Kabinet NATSIR. Program GERAKAN BENTENG dimuali pada bulan April 1950. Hasilnya selama tiga tahun (1950-1953) kurang lebih 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik. Kegagalannya program ini disebabkan oleh :

- a. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- b. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
- c. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
- d. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- e. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara. Beban defisit belanja pada tahun 1952 ini sebanyak 3 miliar rupiah ditambah dengan sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Akhirnya MenKeu Jusf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme, pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan nasionalisasi ini adalah menaikkan pendapatan dan menurunkan Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan UUD No 24 tahun 1951.

4. Sistem Ekonomi Ali Baba

Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Menteri Perkonomian Iskaq Tjokrohadisurjo pada masa Kabinet Ali I. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khusus Cina. Tujuan program Ali Baba meliputi berikut.

- a. Untuk memajukan pengusaha pribumi.
 - b. Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
 - c. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
 - d. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerja sama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
- Pelaksanaan kebijakan Ali Baba ini sebagai berikut.

- a. Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga masyarakat Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf.
- b. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.
- c. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik karena:

- a. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Adapun pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
- b. Indonesia menerapkan sisten liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
- c. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5. Persaingan Finansial Ekonomi (FINEK)

Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung.

Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek yang berisi sebagai berikut.

- A. Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
- B. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
- C. Hubungan Finek didasarkan pada UUD dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga pada 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani UU pembatalan KMB. Sementara itu dampaknya adalah banyak pengusahaan Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada demokrasi liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan pada umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1956. Pembiayaan RPLT diperkirakan sekitar 12,5 miliar rupiah.

Namun dalam pelaksanaannya RPLT tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan sebab berikut.

- Adanya depresi ekonomi di AS dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
- Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
- Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonomi masing-masing.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan

Pada masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Tujuan diadakannya MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.

Namun rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan sebagai berikut.

- Terjadinya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
- Terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan.
- Timbul pemberontakan PRRI / Permesta
- Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
- Memuncaknya ketegangan politik Indonesia Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi.

UJI KREATIVITAS

Buatlah karikatur yang menggambarkan tentang program gunting Syafrudin, Gerakan Benteng, Program Ali Baba, Gerakan Asaat. Masing-masing anak boleh memilih salah satu tema di atas kemudian dituangkan dalam bentuk karikatur digambar di kertas gambar A4, jangan lupa pada kertas gambar dituliskan nama kelas no absen yang nantinya sepulang prakerin harus dikumpulkan. Di warna lebih bagus!

UJI KOMPETENSI

1. Apa yang dimaksud kabinet koalisi? Jelaskan!
2. Menurut Anda apakah manfaat dari nasionalisasi De Javasche Bank?
3. Mengapa hasil pemilu 1955 tidak mampu mewujudkan kestabilan politik Indonesia? Jelaskan!
4. Sebutkan tiga sebab terjadinya instabilitas pemerintahan pada demokrasi liberal (1950-1959)!
5. Berikan alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada 1950-an adalah multipartai!
6. Deskripsikan persamaan dan perbedaan program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal 1950-1959!
7. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya kebijakan sistem ekonomi Ali Baba pada masa kehidupan perekonomian demokrasi liberal? Jelaskan!
8. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia pada saat munculnya kebijakan sistem ekonomi Ali Baba? Uraikan!

Project Based Learning MAKALAH SEJARAH

ATURAN MENGERJAKANNYA buatlah paper dengan tema di bawah ini beserta ketentuannya:

TKJ:

- a. Tema No 1 dikerjakan no absen 1-5
- b. Tema No 2 dikerjakan no absen 6-10
- c. Tema No 3 dikerjakan no absen 11-15
- d. Tema No 4 dikerjakan no absen 16-20
- e. Tema No 5 dikerjakan no absen 21-25
- f. Tema No 6 dikerjakan no absen 26-33
- g. Tema No 7 dikerjakan no absen 34-40

RPL:

- a. Tema No 1 dikerjakan no absen 40-34
- b. Tema No 2 dikerjakan no absen 33-26
- c. Tema No 3 dikerjakan no absen 25-21
- d. Tema No 4 dikerjakan no absen 20-16
- e. Tema No 5 dikerjakan no absen 15-11
- f. Tema No 6 dikerjakan no absen 10-6
- g. Tema No 7 dikerjakan no absen 5-1

TEMA Makalah:

1. Kabinet Natsir
2. Kabinet Sukiman
3. Kabinet Wilopo
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I
5. Kabinet Burhanuddin Harahap
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II
7. Kabinet Juanda

FORMAT MAKALAH:

Cover

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan

BAB II Isi

- A.
- B.
- C.

BAB III Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Rujukan

Jika lebih dari 20 lembar maka menggunakan kata pengantar.

Paper diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 12 spasi
1,5 kertas A4 maksimal 15 lembar.

Boleh menggunakan catatan kaki

A. PETUNJUK Pengerjaan

Join classroom dengan kode berikut:

XII RPL 1: l0v6r7s

XII RPL 2: u2azd0

XII RPL 3: 6mr636

XII RPL 4: 5orp57

XII RPL 5: p4c7foy

XII TKJ 1: abgxfi

XII TKJ 2: n33xlb

XII TKJ 3: 4h95mdn

XII TKJ 4: bhgmbg

Untuk Soal Uji Kompetensi **ditulis tangan di foto kemudian dijadikan satu di halaman terakhir**

MAKALAH dikerjakan dengan diketik dan disimpan dalam bentuk pdf.

Dengan format filename:

No Absen_kelas_nama_Judul

Makalah_tanggal pengiriman

B. Dikumpulkan Terakhir tanggal 30 September 2016

**INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL DIBAWAH PIMPINAN KABINET NATSIR
6 SEPTEMBER 1950-27 APRIL 1951**

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas matapelajaran Sejarah Indonesia
Dibina oleh Ana Wahyuning S, S. Pd



Oleh :
SHANTY AYU DARMAWAN
No ABSEN
KELAS XII RPL 5

**SMK TELKOM MALANG
(STATUS TER AKREDITASI A)**

Jalan Danau Ranau Sawojajar Malang 65136 Telp (0341) 712500
Website: www.smktelkom-mlg.sch.id Email: admin@smktelkom-mlg.sch.id
September, 2016